

KONSTRUKSI MAKNA IDEOLOGI HIZBUT TAHRIR

(Studi Fenomenologi Tentang Makna Ideologi Khilafah dan Politik Aktivistis Hizbut Tahrir di Pekanbaru)

Muhammad Firdaus

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau
E mail: fathihza@gmail.com

Abstrak: Hizbut Tahrir sebagai kelompok gerakan perubahan memiliki konsep ideologi yang senantiasa diperjuangkan dalam kehidupan masyarakat. Agenda perjuangan politik aktivis Hizbut Tahrir adalah tegaknya daulah khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir mengidentifikasi dirinya sebagai gerakan partai politik Islam non Parlemen yang memiliki jaringan luas dengan keberadaannya di berbagai negara. Pemikiran Hizbut Tahrir anti demokrasi yang bergerak di luar sistem politik yang berlaku secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konstruksi makna ideologi khilafah dan ideologi politik aktivis Hizbut Tahrir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan berperan serta dan data penunjang penelitian diperoleh melalui studi literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna ideologi khilafah dikonstruksikan oleh aktivis terdiri dari enam makna dan makna politik juga dikonstruksikan oleh aktivis terdiri dari enam makna.

Kata Kunci: Makna, Khilafah, Politik, Hizbut Tahrir

***Abstract:** Hizbut Tahrir as a group of change movement has always championed the concept of ideology in Political struggle of the Hizbut Tahrir activists agenda is the establishment of a daulah khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir identifies itself as a movement of non-parliament Islamic political parties that has an extensive network with its existence in the various countries. The thought of Hizbut Tahrir is anti-democratic that moves beyond the political system in general. This research aims to determine the to know the meaning construction of khilafah ideology and political ideology of Hizbut Tahrir. The method used in this research is a qualitative method with phenomenological study types. Subjects in this research is the Hizbut Tahrir activists in Pekanbaru. Data collection obtained through in-depth interviews and participant observation. Supporting data of this research obtained through the study of literature and previous research. The results of the research indicated that the ideological meaning that constructed by activists consists of six different meanings and political meaning also constructed by activists consists of six different meanings.*

Key Words: Meaning, Khilafah, Politic, Hizbut Tahrir

PENDAHULUAN

Gerakan-gerakan yang di pengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan merupakan fenomena yang masif dan marak dalam dekade sekarang ini. Gerakan ini berkembang dalam berbagai bentuk perilaku dan komunikasi yang berbeda.

Perkembangannya juga dipengaruhi oleh kondisi sosial politik dan berbagai permasalahan yang melingkupinya. Dalam konteks agama Islam, bagaimana ajaran Islam tersebut dipersepsikan dan dimaknai oleh penganutnya, hal ini tentunya menimbulkan berbagai perbedaan pemikiran antara satu

kelompok dengan kelompok lainnya. Dalam agama Islam terjadi kebangkitan kembali tradisionalisme, pemurnian agama, yang pada tingkat tertentu merupakan kritik terhadap modernisme. Dalam masyarakat Indonesia, kekecewaan terhadap kondisi sosial yang ada memicu munculnya kelompok-kelompok yang menghendaki adanya transformasi masyarakat secara total. Berbagai masalah yang melanda bangsa seperti, kemiskinan, pengangguran, korupsi, kejahatan dan sebagainya, melahirkan kekecewaan yang mendalam di kalangan masyarakat.

Menjawab jalan keluar terhadap krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia, kelompok Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), memberikan sebuah alternatif bahwa ajaran Islam adalah solusi. Hizbut Tahrir berpandangan bahwa Islam tidak hanya menyajikan nilai-nilai moral dan agama yang akan membimbing manusia dalam urusan ukhrawi, tetapi juga menyajikan tentang aturan-aturan keduniaan yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia. HTI menyakini bahwa penerapan syariat Islam dengan konsep khilafah Islam adalah jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan bangsa.

Hizbut Tahrir merupakan salah satu kelompok Islam yang mempunyai perkembangan dan pengaruh yang pesat di Indonesia. Hizbut Tahrir mengidentifikasi dirinya sebagai gerakan partai politik Islam non parlemen, pemikirannya anti demokrasi yang bergerak di luar sistem politik yang berlaku secara umum serta memiliki jaringan yang luas dengan keberadaan kelompok Hizbut Tahrir yang tersebar di beberapa negara Asia, Eropa dan Amerika. Hizbut Tahrir berpandangan bahwa ideologi Islam tidak hanya

sebagai agama tetapi juga sebagai bagian dari politik. Oleh karena itu, dalam menyebarkan paham dan ideologinya aktivis HTI menggunakan berbagai cara dan metode komunikasi yang dilakukan secara konsisten dengan meliputi berbagai daerah, wilayah dan negara.

Perkembangan kelompok keagamaan khususnya Hizbut Tahrir di Pekanbaru mengalami perkembangan yang pesat. Hizbut Tahrir Pekanbaru merupakan kelompok Islam yang aktif dalam memperjuangkan konsep ideologinya. Hizbut Tahrir melakukan kontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Pemikiran Hizbut Tahrir disampaikan dengan berbagai cara, seperti melalui tulisan, diskusi, seminar, kajian keagamaan, aksi demo dan sebagainya. Disamping itu, Hizbut Tahrir Pekanbaru juga melakukan kegiatan rutin, mingguan dalam bentuk kajian keagamaan.

Pentingnya mengkaji Hizbut Tahrir baik dalam konteks nasional maupun lokal, akan terlihat apabila mengkaji Hizbut Tahrir sebagai suatu gerakan politik keagamaan yang bersifat transnasional dan bagaimana aktivis Hizbut Tahrir mengkonstruksikan diri mereka di tengah keberagaman masyarakat. Istilah Islam transnasional telah menjadi sebuah kajian akademis tersendiri yang memiliki makna spesifik dan berbeda dari entitas kelompok Islam yang lain. Berbeda dengan kelompok keagamaan Islam lain yang siap melakukan serangkaian adaptasi dan asimilasi, aktivis Hizbut Tahrir Indonesia ingin mempertegas dimensi Islam kaffah dengan mengkonstruksikan diri yang mengacu kepada ajaran Rasulullah dengan konsep khilafah Islamiyah. Menurut Hilmy dalam Islamica (2011), meminjam istilah Bung

Hatta, kelompok Islam yang lain seperti Muhammadiyah dan NU melakukan apa yang disebut sebagai “politik garam” bukan “politik gincu”. Jika politik garam mengasumsikan pelarutan dan persenyawaan antara Islam dengan nilai-nilai lokal Indonesia, maka dalam politik gincu lebih mengemukakan identitas keagamaan Islam sesuai dengan warna aslinya.

Konsep ideologi khilafah Islamiyah yang diusung dan diperjuangkan oleh aktivis Hizbut Tahrir merupakan sesuatu ideologi yang berbeda dengan ideologi bangsa Indonesia yang ada sekarang. Ideologi khilafah Islamiyah diakui oleh aktivis Hizbut Tahrir sebagai ideologi yang membawa solusi terhadap persoalan bangsa dan masyarakat. Ideologi khilafah sebagai anti tesis terhadap ideologi dan sistem demokrasi yang ada sekarang. Hal ini tentu saja menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.

Perdebatan dan kondisi ini tentu saja menimbulkan dinamika di tengah masyarakat yang plural, menimbulkan pro dan kontra terhadap ide dan ajaran yang dibawa oleh Hizbut Tahrir. Lalu bagaimana aktivis Hizbut Tahrir memaknai ideologi khilafah dan politik dalam kehidupannya sebagai bagian dari masyarakat yang plural. Diperlukan pemahaman bahwa fenomena munculnya berbagai perilaku sosial, nilai keagamaan dalam masyarakat, merupakan upaya perilaku pemeluknya untuk menggali dan memaknai peristiwa komunikasi yang mereka jalani. Hal ini merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, transformasi keyakinan dan ideologi yang dianut terimplementasikan dalam sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konstruksi Makna

Konstruksi makna dapat digunakan untuk memahami sudut pandang pemaknaan komunikasi antar manusia. Orientasi konstruktivisme menekankan pentingnya proses interpretatif sebagai penentu tindakan individu dan perilaku komunikasi. Secara individual pembentukan makna dilakukan untuk pembentukkan persepsi seseorang.

Peter L Berger dan Thomas Luckman pada awal memulai pemikiran mengenai konstruksi atas realita melalui pembagian secara jelas mengenai organisme dan aktivitasnya. Menurut mereka manusia sebagai makhluk hidup menempati kedudukan yang khas dan berbeda bila dibandingkan dengan binatang, antara lain manusia tidak mempunyai lingkungan yang spesifik bagi jenisnya serta tidak mempunyai lingkungan yang dibangun dengan kukuh oleh nalurinya sendiri. Atau dengan kata lain tidak ada dunia manusia yang satu, yang ada hanyalah dunia binatang dengan kekhasannya. Hubungan manusia justru sebaliknya, hubungan manusia dengan lingkungannya bersifat keterbukaan atau dengan kata lain bahwa struktur hubungan antar manusia dengan lingkungannya tidak ditentukan oleh sifat biologisnya, oleh karena itu memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai jenis kegiatan. Kebebasan untuk melakukan berbagai jenis kegiatan bukan berarti manusia tidak ada pembatasnya, justru perlengkapan inderawilah yang membatasi lingkup manusia ketika mereka beralih dari satu lingkungan ke lingkungan lain.

Sedangkan makna senantiasa berkembang seiring waktu dan lingkungan. Pembentukan makna adalah berfikir dan setiap individu memiliki kemampuan berpikir sesuai dengan kemampuan kognitif atau informasi yang dimilikinya. Manusia mempelajari makna dalam interaksi sosial dimana mereka menanggapi simbol dengan cara berpikir, simbol manusia secara aktif mencipta ulang dunia tempat mereka berperan.

Fenomenologi

Fenomenologi dikembangkan oleh Alfred Schutz (1899-1959) yang merupakan murid dari Edmund Husserl (1859-1938). Husserl merupakan tokoh utama dari aliran fenomenologi. Menurut Husserl dalam (Kuswarno, 2007:9) fenomenologi adalah ilmu yang fundamental dalam berfilsafat. Fenomenologi adalah ilmu tentang hakikat dan bersifat a priori. Sedangkan Alfred Schutz menjadikan fenomenologi sebagai landasan bagi sosiologi interpretatif. Schutz yang mengembangkan fenomenologi dalam ilmu sosial. Dalam kajiannya, dia melihat perilaku sosial sebagai perilaku yang berorientasi pada orang lain. Ia kemudian memunculkan istilah *"the stream consciousness"* (arus kesadaran) bahwa lapisan terdalam pengalaman dapat dijangkau dengan merefleksikan menemukan sumber tertinggi fenomena makna dan pemahaman (*verstehen*).

Perspektif fenomenologi disebut juga perspektif interpretatif. Maurice Natanson dalam Mulyana (2002: 59) menyebutkan:

Istilah fenomenologis sebagai suatu istilah generik untuk merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang

menganggap kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial. Menurut Natanson, pandangan fenomenologis atas realitas sosial menganggap dunia intersubjektif sebagai terbentuk dalam aktivitas kesadaran yang salah satunya hasil dari ilmu alam.

Fenomenologi menjadikan hidup seseorang dengan memahami dan memberi makna obyek, seperti pada pemahaman akan cirinya. Lebih spesifik bahwa fenomenologi berarti memahami pengalaman hidup manusia.

Menurut Creswell (2007: 57) studi fenomenologi adalah:

Phenomenological study describes the meaning for several individuals of their lived experiences of a concept or a phenomenon. Phenomenologists focus on describing what all participants have in common as they experience a phenomenon. The basic purpose of phenomenology is to reduce individual experiences with a phenomenon to a description of the universal essence.

Fenomenologi menggambarkan makna dari pengalaman individu-individu, mengidentifikasi hakekat pengalaman hidup sejumlah orang mengenai konsep atau gejala. Fenomenologi berpandangan bahwa apa yang tampak di permukaan seperti pola perilaku sehari-hari hanyalah suatu gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi di kepala sang pelaku.

Perilaku apapun pada tingkat permukaan baru bisa dipahami manakala bisa membongkar kesadaran dari pelaku. Karena realitas itu bersifat subjektif dan maknawi, maka ia bergantung pada persepsi. Persepsi merupakan inti dari kajian komunikasi.

Sedangkan tujuan utama fenomenologi menurut Kuswarno (2009:2) adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran dan dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. Morissan (2009:31) menyatakan, bahwa fenomenologi merupakan sebuah tradisi yang menekankan pada interpretasi seseorang dari pengalaman subjektif yang dimiliki partisipan.

Stanley Deetz (dalam Littlejohn, 2006: 57) merangkum tiga prinsip dasar asumsi dari fenomenologi Schutz; *Pertama*, pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar-kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengannya. *Kedua*, makna benda terdiri dari kekuatan benda dalam kehidupan seseorang, bagaimana anda berhubungan dengan benda menentukan maknanya bagi anda. *Ketiga*, bahasa merupakan kendaraan makna. Melalui bahasa yang kita gunakan kita mendeskripsikan dan mengekspresikan dunia itu. Melalui kata dan bahasa segalanya sesuatu ada.

Sehubungan dengan komunikasi Hizbut Tahrir, bagaimana anggota Hizbut Tahrir memaknai pengalaman sadar mereka dalam melaksanakan kegiatannya sebagai seorang aktivis Hizbut Tahrir. Dalam konteks fenomenologis, para aktivis ini adalah aktor yang melakukan tindakan sosial bersama aktor lainnya sehingga

memiliki kesamaan dan kebersamaan dalam ikatan makna intersubjektif. Para aktor tersebut memiliki pengalaman sadar dan dapat dilihat dalam bentuk yang alami dalam mereka melakukan aktivitas sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang konstruksi makna ideologi aktivis Hizbut Tahrir menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode kualitatif atau paradigma interpretif mengungkapkan pengalaman yang dialami oleh aktivis Hizbut Tahrir dan memandang subjek sebagai makhluk yang aktif yang mempunyai kemauan dan kehendak dalam berperilaku dan melakukan interaksi. Realitas sosial merupakan suatu fenomena yang dicermati sesuai dengan konteksnya. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan fenomena komunikasi Hizbut Tahrir dalam menjalani aktivitasnya berdasarkan pandangan atau pengalaman hidup mereka sendiri tentang suatu konsep atau gejala, dan pemaknaan mereka dalam mengungkap realitas sosial.

Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Untuk menganalisis data secara kualitatif, menggunakan analisis data Model Interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992), yaitu suatu teknik analisis data yang menggambarkan sifat interaktif koleksi data. Lebih lanjut, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa *data analysis consists of three flows of activity : data reduction, data display, and conclusion drawing verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hizbut Tahrir sebagai gerakan partai politik Islam mempunyai ideologi yang senantiasa diperjuangkan untuk bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengamatan, Hizbut Tahrir senantiasa mengusung dan memperkenalkan ideologi khilafah kepada masyarakat. Hizbut Tahrir sebagai sebuah gerakan perubahan dapat dipahami dengan memahami makna ideologi yang dikonstruksikan oleh aktivis Hizbut Tahrir sebagai pelaku pergerakan. Pemaknaan nilai ideologi yang mereka usung mendasari tindakan mereka dan menjadi landasan setiap perilaku yang mereka lakukan. Ideologi yang senantiasa Hizbut Tahrir perkenalkan dan mereka perjuangkan adalah ideologi khilafah Islam. Ideologi diartikan sebagai gagasan, ide, kepercayaan, keyakinan yang mengatur secara komprehensif seluruh dimensi kehidupan umat manusia baik aspek pemerintahan, pengelolaan negara maupun aspek kehidupan sehari-hari. Segala tindakan anggota Hizbut Tahrir mengacu kepada ideologi yang mereka usung walaupun gagasan atau ide tersebut belum sepenuhnya bisa terealisasi dalam kehidupan disebabkan sistem pemerintahan Islam belum bisa diterapkan, namun ideologi ini harus senantiasa diperjuangkan. Ideologi ini dianggap sebagai visi dari Hizbut Tahrir, menjadi acuan cara mereka memandang dan bertindak terhadap sesuatu.

Makna Khilafah Hizbut Tahrir

Perjuangan aktivis Hizbut Tahrir sejak berdiri sampai sekarang pada hakikatnya untuk melanjutkan kehidupan Islam, hal ini bisa terwujud apabila ditegakkannya daulah khilafah. Konsep khilafah yang dibangun aktivis Hizbut Tahrir merujuk kepada sistem khilafah yang pernah dijalani pada masa Rasulullah dan masa sahabat. Konsep khilafah yang digagas dan ditawarkan Hizbut Tahrir adalah sistem kenegaraan untuk mengelola kehidupan dengan dasar-dasar Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Peneliti mengamati bahwa konsep khilafah ini senantiasa hadir dalam setiap kegiatan atau aktivitas komunikasi Hizbut Tahrir baik dalam bentuk tulisan seperti majalah, bulletin, selebaran, spanduk maupun dalam bentuk lisan yang disampaikan sewaktu demo, tabligh, seminar, diskusi dan sebagainya. Pandangan aktivis Hizbut Tahrir tentang khilafah memberikan berbagai kedalaman pendapat dan beragam makna tergantung pemahaman dan pengalaman mereka dalam menjalani aktivitas sebagai aktivis Hizbut Tahrir.

Terdapat enam bentuk makna khilafah yang terungkap dari para informan, yaitu (1) kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin, (2) Pemerintahan Islam bagi kaum muslimin sedunia, (3) Kepemimpinan umum kaum muslimin diseluruh dunia dalam menerapkan syariat Islam, (4) Kepemimpinan umum bagi umat Islam, (5) Sesuatu keharusan bagi orang Islam, (6) Penting antara hidup dan mati.

Tabel tentang makna khilafah dari aktivis Hizbut Tahrir Pekanbaru.

Tabel 1
Makna Khilafah

No	Informan	Makna Khilafah	Karakteristik Makna Khilafah
1.	Ustad Ilham, Riki	Kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem berdasarkan Islam yang diajarkan Rasulullah - Problem solving bagi Kehidupan - Penyatuan umat Muslim
2.	Ustad Ahmad	Pemerintahan Islam bagi kaum muslimin sedunia	<ul style="list-style-type: none"> - Al-Qur'an Sunnah dan seluruh mazhab sepakat bahwa khilafah wajib - 1,4 Miliar umat Islam tidak ada Pemimpin - Khilafah itu Indah - Khilafah ala ISIS bohongan
3.	Ustad Iman, Abdullah, Fitri	Kepemimpinan umum kaum muslimin di seluruh dunia dalam menerapkan syariat Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan syariat Islam - Persatuan kaum muslimin - Khilafah bukan membubarkan negara tapi solusi dengan aturan Islam
4.	Iwan, Anshar, Anto, Yahya	Kepemimpinan Umum bagi Umat Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Khilafah anugerah buat umat manusia, muslim dan non muslim - Pmerintahan negara dengan aturan Islam - Semua penganut agama di hargai dan dijamin keamanannya
5.	Abas	Sesuatu Keharusan bagi Orang Muslim	<ul style="list-style-type: none"> - Negara yang satu, pemimpin yang satu dan umat yang satu - Kondisi masyarakat rusak karena tidak pakai aturan Islam
6.	Ustad Umar	Penting antara Hidup dan Mati	<ul style="list-style-type: none"> - Landasan kuat Al-Qur'an dan Hadist - Penerapan khilafah tanpa kekerasan

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian (2016)

Makna Politik Hizbut Tahrir

Sebagai gerakan perubahan, Hizbut Tahrir pada dasarnya memiliki konsep politik sebagai garis perjuangan

untuk mencapai target yang diinginkan. Pemaknaan politik menurut aktivis Hizbut Tahrir mempunyai pandangan yang berbeda dengan pandangan masyarakat pada umumnya. Politik

adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri oleh khalifah (pemimpin) sesuai dengan hukum Islam. Politik dilaksanakan oleh negara dan umat, karena negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan secara praktis, sedangkan umat mengawasi negara dalam pengaturan tersebut.

Bagi aktivis Hizbut Tahrir, bahwa agenda politiknya adalah tegaknya daulah khilafah. Dengan tegaknya daulah khilafah sehingga bisa diterapkan syariat Islam secara total. Sejak awal, gerakan Islam Hizbut Tahrir sudah mempunyai agenda pokok untuk menerapkan syariat Islam. Desakan untuk menerapkan syariat Islam bukan menjadi wacana tetapi sudah mengarah kepada realitas politik yang mengubah tatanan kehidupan bernegara. Kuatnya desakan penerapan syariat Islam oleh Hizbut Tahrir Indonesia sebagai sikap ketidakpuasan dengan sistem hukum Indonesia yang tidak mengacu kepada aturan hukum Islam. Dari sini, kemudian muncul slogan ideologi dikalangan aktivis Hizbut Tahrir yaitu, tegakkan

syariah dan khilafah. Hizbut Tahrir Indonesia yang mengaku sebagai partai politik Islam, namun Hizbut Tahrir tidak menjalankan mekanisme resmi sebagai partai politik. Hizbut Tahrir tidak memperbolehkan anggotanya untuk masuk parlemen, Hizbut Tahrir hanya sebatas menghibau dan memberikan masukan dan tidak terlibat langsung dalam pembuatan undang-undang. Itulah sikap politik Hizbut Tahrir yang berbeda dengan pandangan politik masyarakat secara umum.

Aktivis Hizbut Tahrir memaknai kata politik berbeda dengan pandangan masyarakat pada umumnya, terdapat enam bentuk makna politik yang terungkap dari para informan, yaitu (1) Mengurusi urusan umat dan memelihara urusan masyarakat, (2) Membina masyarakat, (3) mengurus umat dengan aturan Allah, (4) Riayah, mengurus umat dalam dan luar negeri, (5) Tidak masuk parlemen, (6) Amar ma'ruf nahi munkar, tidak mesti ikut pemilu.

Tabel tentang makna Politik dari aktivis Hizbut Tahrir Pekanbaru.

Tabel 2

Makna Politik

No	Informan	Makna Politik	Karakteristik Makna Politik
1.	Ustad Ilham, Anto	Mengurusi urusan Umat dan Memelihara urusan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Politik tidak harus masuk parlemen dan menjadi anggota DPR - Politik yang sejatinya mengurus masyarakat - Sistem demokrasi sistem kufur
2.	Ustad Ahmad, Ustad Umar, Fitri	Membina Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Membina masyarakat muslim dan non muslim - HT adalah partai politik Islam yang tidak masuk parlemen - Legal formal HTI terdaftar sebagai ormas tapi

			secara substansi partai Islam
3.	Riki, Anshar, Abdullah, Yahya	Mengurusi Umat dengan Aturan Allah	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap perjuangan politik tidak harus masuk parlemen - Tidak mungkin masuk ke sistem jahiliyah atau kufur - Kaulatan ditangan syara' bukan di tangan rakyat - Sistem buatan manusia banyak kelemahan
4.	Ustad Iman	Riayah, Mengurusi urusan Umat dalam dan luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Politik bukan mencari atau merebut kekuasaan tapi mengurus urusan umat - Mengurus umat tidak sekali dalam 5 tahun atau menjelang pemilu tapi setiap saat
5.	Iwan	Tidak Masuk Parlemen	<ul style="list-style-type: none"> - Politik tidak mencari kekuasaan - Hakikat politik menyebarkan dakwah Islam - Mengatur urusan masyarakat tanpa aturan Allah adalah kufur
6.	Abas	Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Tidak mesti Ikut Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian pemilu HTI berbeda dengan dengan pandangan umum - Pemilu Islam hanya memilih pemimpin - Undang-undang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian (2016)

Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam yang berperan dalam aktivitas politik untuk membangun negara khilafah. Untuk mencapai tujuan penegakan negara khilafah, Hizbut Tahrir menerapkan strategi dan metode untuk mencapai target perjuangannya melalui dakwah. Dalam pandangan peneliti, perjuangan yang dilakukan Hizbut Tahrir melalui berbagai aksi, kegiatan dakwah serta penyebaran ide pemikirannya melalui media, bertujuan untuk merubah sistem pemerintahan yang ada dengan sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Aktivis Hizbut Tahrir menyakini bahwa mengganti

sistem yang ada dengan sistem berdasarkan syariat Islam bukanlah aktivitas yang radikal seperti yang diungkapkan beberapa informan pada bab hasil penelitian, karena metode yang digunakan Hizbut Tahrir mengacu kepada metode rasulullah dalam menyebarkan dakwah Islam, tanpa kekerasan. Cara seperti inilah yang digunakan Hizbut Tahrir dalam perjuangannya, yaitu "*la madiniyan*" tanpa kekerasan.

Ide pembentukan sistem khilafah dengan konsep negara Islam merupakan implementasi politik Islam yang didasarkan keyakinan ideologi

bahwa Islam sebagai suatu agama sekaligus mengandung ajaran tentang sistem kemasyarakatan yang mempunyai aturan yang lengkap dan jelas dalam mengelola dan mengatur negara, dan sejarah telah membuktikannya dengan kepemimpinan Rasulullah sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara, dan pemerintahan dilanjutkan pada masa khulafa rasyidin hingga pada masa khilafah Usmaniyah di Turki. Dalam pandangan Hizbut Tahrir, bahwa pemerintahan yang pada sekarang ini dianggap sebagai *darul kufur*. Dengan dasar sebagai *darul kufur* inilah dijadikan alasan untuk mengganti ideologi dan mengambil alih kekuasaan dengan jalan perjuangan dakwah. Konsep keagamaan yang diperjuangkan Hizbut Tahrir adalah perjuangan politik Islam dengan konsep khilafah Islam. Hizbut Tahrir menolak konsep demokrasi, nasionalisme, liberalisme, kapitalisme, menurut mereka ini merupakan konsep hasil ciptaan manusia yang di pakai oleh negara-negara non muslim. Kenapa umat Islam mengacu kepada konsep tersebut yang menurut mereka hanya konsep dangkal hasil pemikiran manusia dan terbukti konsep tersebut menimbulkan banyak masalah, kenapa umat Islam tidak menggunakan aturan Allah yang pasti kebenarannya dan menimbulkan kemaslahatan, yang diungkapkan oleh ustad Ahmad, Abas, Riki, Ilham. Alasan menolak demokrasi:

1. Demokrasi itu sistem kufur, bukan berasal dari Allah. Asas demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi menjadikan manusia sebagai sumber hukum.
2. Demokrasi melegalkan kekufuran

3. Demokrasi melahirkan sistem ekonomi kapitalisme yang zholim, rakus dan eksploitatif.
4. Melegalkan kemaksiatan atas nama HAM, seperti pelacuran, homoseksual, gay, atau LGBT.

Menurut aktivis Hizbut Tahrir, ustad Ahmad, ustad Ilham, penduduk Indoensia mayoritas beragama Islam, dan penduduk Islam di dunia berjumlah lebih 1,4 Milyar orang, sudah saatnya untuk mengacu kepada negara khilafah untuk menegakkan aturan Islam. Hizbut Tahrir memposisikan dirinya sebagai kelompok yang anti demokrasi, hal ini sering mereka dengung-dengungkan dalam setiap aktivitas yang di selenggarakan dan dalam setiap tulisan di berbagai media yang dikeluarkan Hizbut Tahrir.

Jalan demokrasi atau revolusi bukanlah jalan Islam. Kedua jalan ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Selain itu ada beberapa bahaya jika menggunakan jalan demokrasi yang tidak dicontohkan Rasulullah, seperti yang diungkapkan media Hizbut Tahrir (*al-Wa'ie*, no 174: 14-15) sebagai berikut:

1. Bahaya ideologis. Sistem demokrasi adalah sistem kufur karena menjadikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Konsekuensinya, rakyat yang dipresentasikan oleh wakil rakyat berpeluang dan memiliki hak membuat undang-undang. Padahal dalam Islam, hak membuat hukum dan perundang-undangan hanyalah Allah SWT. Orang yang terlibat dalam sistem demokrasi, walaupun masih menyakini Islam sebagai solusi, ketika mereka melakukan legislasi, yakni membuat undang-undang,

apalagi undang-undang yang dibuat tidak sejalan dengan Islam, maka jelas telah melakukan keharaman.

2. Bahaya pragmatisme. Masuk kedalam sistem demokrasi yang tidak menjadikan Islam sebagai standar berpikir dan bertindak akan membuat siapapun bebas mengeluarkan ide yang bahkan jauh bertentangan dengan Islam. Di sisi lain ada pihak yang masih menginginkan nilai-nilai Islam. Lalu agar tercapai titik temu masing-masing pihak harus melakukan kompromi politik. Dengan adanya kompromi politik, alih-alih bicara idealisme, yang sering terjadi malah aktivis terjebak pragmatisme.
3. Menjauhkan umat dari perjuangan menegakkan khilafah. Tujuan awalnya ingin agar Islam diterapkan melalui jalan demokrasi dan hanya menjadikan demokrasi sebagai jalan bukan tujuan. Namun, ketika menghadapi situasi dan kondisi politik sekular, akhirnya syariah Islam disembunyikan. Gagasan tentang syariah dan khilafah Islam pun dibuang. Teriakannya tidak jauh berbeda dengan politisi sekular, "demokratisasi" bukan "islamisasi". Alasannya kalau bicara Islam, takut dituduh sektarian. Kalau memperjuangkan syariah Islam takut tidak mendapatkan dukungan. Akhirnya, alih-alih berjuang untuk Islam, yang terjadi malah menjauhkan gagasan syariah dan khilafah Islam dari umat Islam.

Argumen yang dibangun Hizbut Tahrir yang menolak demokrasi adalah

sistem demokrasi dimaknai sebagai sistem yang kufur, jahiliyah, bathil dan sebagai sistem kapitalis barat yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist. Demokrasi tidak universal karena didalamnya ada campur tangan manusia dalam artian sistem demokrasi diciptakan dari logika dan hasil kesepakatan manusia yang relatif. Adapun khilafah mengacu kepada aturan al-Qur'an dan Hadist nabi yang diyakini kebenarannya.

Berdasarkan pengamatan, peneliti melihat kuatnya desakan penerapan syariat Islam oleh aktivis Hizbut Tahrir sebagai sikap ketidakpuasan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Dari sinilah muncul slogan dari Hizbut Tahrir dalam setiap aktivitasnya dengan slogan "tegakkan syariat dan khilafah". Dari berbagai buku yang dikeluarkan Hizbut Tahrir serta tulisan dalam bentuk selebaran, pamflet, bulletin, jurnal, isi tulisannya bersifat mengkritisi dan mengecam sistem demokrasi. Sistem demokrasi adalah sistem yang kufur yang merusak tatanan kenegaraan yang ideal yang seharusnya berdasarkan sistem Islam.

Hizbut Tahrir yang berdiri berdasarkan ideologi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan melanjutkan kehidupan Islam. Hizbut Tahrir adalah partai politik, yaitu kelompok yang memelihara urusan masyarakat. Politik menurut pengertian Hizbut Tahrir berbeda dengan politik menurut masyarakat secara umum. Politik menurut Hizbut Tahrir adalah riayah, memelihara urusan masyarakat dengan pemikiran dan perbuatan. Politik menurut aktivis Hizbut Tahrir tidak harus masuk parlemen tapi memelihara

masyarakat dan memberikan pemahaman Islam kepada masyarakat.

Hizbut Tahrir sebagai partai politik Islam, menjalankan peran yang menurut mereka sebagai aktivitas politik. Syabab atau aktivis Hizbut Tahrir adalah politisi, bukan politisi pada tataran konsep atau teoritis, tetapi politisi yang terjun ke masyarakat disamping juga sebagai penjuang dakwah. Sebagai gerakan politik Islam, Hizbut Tahrir berdiri untuk menegakkan daulah khilafah sebagai misi perjuangan. Konsep daulah khilafah yang dibangun Hizbut Tahrir merujuk kepada sistem khilafah yang pernah ada pada masa Rasulullah dan para sahabat. Konsep daulah khilafah ini membentuk sebuah negara sistem pemerintahan yang dijabat oleh seorang khalifah.

Berangkat dari pembahasan tersebut, akar pemikiran politik dan khilafah Hizbut Tahrir didasarkan pada pemaknaan konteks yang berdasar pada teks al-Qur'an dan Hadist, yaitu kewajiban ber hukum dengan hukum Allah dan didasari dengan ideologi Islam kaffah. Pemaknaan konteks dari setiap aktivis Hizbut Tahrir sangat tergantung dari pengalaman yang di dapat mereka dalam memahami realitasnya. Pengalaman ini juga dipengaruhi oleh tingkat intensitas aktivis dalam menjalankan aktivitas keHizbut Tahriran.

Ide khilafah terus berkembang luas ditengah masyarakat, banyak masyarakat yang sudah tahu atau pernah mendengar ide khilafah. Khilafah menjadi perbincangan ditengah masyarakat dan menjadi topik kajian pembahasan. Sambutan kaum muslimin beragama tentang konsep khilafah, konsep ini selalu diusung dan menjadi topik utama dalam kelompok Hizbut

Tahrir. Disamping sambutan masyarakat yang mendukung, muncul pula upaya sebaliknya, ada yang menganggap khilafah sebagai ancaman dan ada juga mencoba membingkai istilah khilafah dengan paham nasionalisme. Kata khilafah sudah banyak dikenal ditengah masyarakat, kata ini tentu sudah menyatu dalam aktivitas dan pikiran aktivis Hizbut Tahrir. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa makna kata khilafah mengandung makna tertentu bagi informan penelitian.

Pemaknaan individu terhadap sesuatu terbentuk berdasarkan hasil pengalamannya dan tiap individu memiliki pengalaman yang berbeda. Walaupun para informan penelitian mengenal dan memahami kata khilafah yang didapat dari berbagai sumber, seperti dari kajian halaqah yang dibimbing oleh musyrif mereka, dari bacaan, buku, serta selebaran yang mereka dapati, namun dalam memberikan makna para informan sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan interpretasinya. Pemaknaan juga ditentukan oleh interaksi individu dengan lingkungannya. Kondisi lingkungan bisa merubah pikiran dan tindakan seseorang yang juga mempengaruhi dalam memberi makna terhadap sesuatu. Makna terhadap sesuatu yang dimiliki individu tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui proses pembentukan yang melibatkan aspek kesadaran, perasaan, pengalaman bahkan interaksi yang melibatkan banyak faktor. Para aktivis Hizbut Tahrir sebagai pelaku penelitian, dalam memberi makna terhadap ideologi khilafah dan politik tidak terbentuk begitu saja tetapi melalui proses kesadaran dan pengalaman yang panjang yang mereka jalani dalam

berinteraksi dengan aktivis Hizbut Tahrir yang lain.

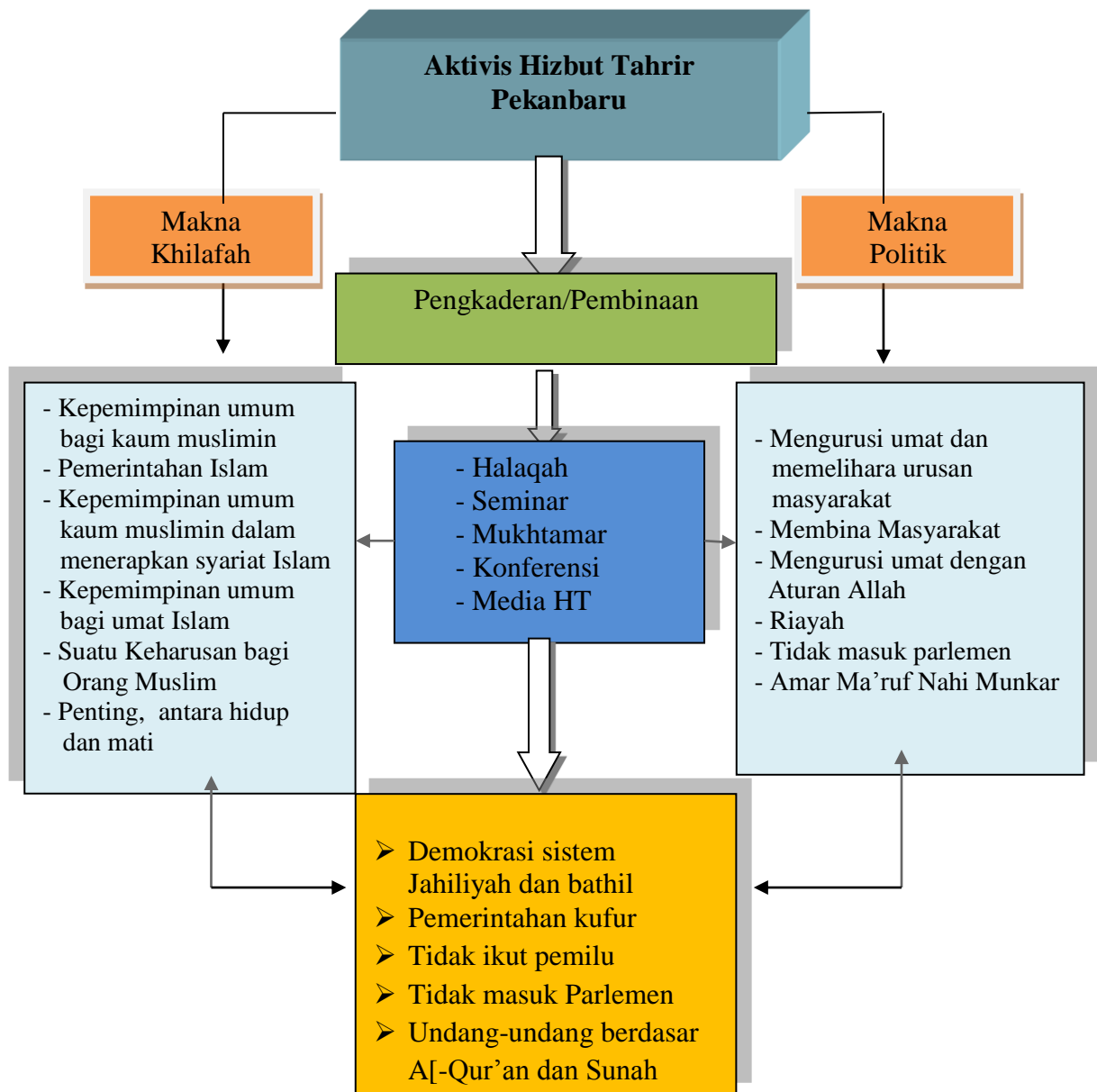
Berdasarkan hasil penelitian bahwa kesadaran dan pengalaman aktivis Hizbut Tahrir ini bisa mereka dapatkan ketika mereka mengikuti pengkaderan dan pembinaan dalam bentuk kajian halaqah yang mereka ikuti. Kajian halaqah ini rutin setiap minggu diadakan oleh kelompok Hizbut Tahrir. Melalui proses halaqah ini terjadi *transfer knowledge*, yang menambah pemahaman para aktivis tentang apa yang dipelajarinya, hal ini tentu akan berpengaruh dalam pembentukan makna tentang konsep ideologi Hizbut Tahrir.

Pengalaman melalui beberapa peristiwa yang dialami oleh pelaku penelitian tentang aktivitas halaqah akan menghasilkan kesadaran dan pikiran. Hal kesadaran dan pikiran inilah yang mendorong pembentukan makna dalam ideologi khilafah dan politik dalam perspektif pelaku penelitian. Beberapa informan memberikan makna tentang khilafah dan politik dengan beragam sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Hal ini sesuai dengan studi fenomenologi yang diungkapkan Creswell, bahwa fenomenologi menggambarkan makna dari pengalaman individu-individu, mengidentifikasi hakikat pengalaman hidup sejumlah orang mengenai konsep dan gejala. Fenomenologi berpandangan bahwa apa yang tampak di permukaan hanyalah suatu gejala atau fenomena yang tersembunyi di kepala sang pelaku. Hal ini baru bisa dipahami manakala membongkar kesadaran dari pelaku.

Berdasarkan perspektif fenomenologi, sebuah peristiwa tidak dapat memiliki makna sendiri, kecuali manusianya dalam hal ini aktivis Hizbut Tahrir yang membuatnya menjadi bermakna. Makna itu harus dimiliki dan dipahami bersama. Dalam konteks interaksi sosial, interaksi bersama orang lain merupakan arena untuk membangun makna. Ketika suatu kelompok memiliki pengetahuan yang sama, mereka akan memiliki keyakinan yang sama akan suatu realitas. Dalam proses membangun tersebut mereka menggunakan bahasa, karena dengan bahasa individu - individu menegosiasikan makna.

Ketika melakukan suatu tindakan, manusia dalam hal ini aktivis Hizbut Tahrir menginterpretasikan keadaan disekitarnya dan memberi makna pada peristiwa yang mereka hadapi tersebut. Dengan makna tersebut, mereka melakukan tindakan, dengan demikian makna menjadi penting. Pemahaman terhadap makna merupakan refleksi dari pengalaman yang dirasakan saat tertentu atau berbagai pengalaman yang dirasakannya selama bertahun-tahun dan juga pengalaman dari orang lain. Ketika ia berinteraksi dengan orang lain, ia bukan hanya menginterpretasi pengalamannya pribadi, tetapi ia juga menginterpretasi pengalaman orang lain yang dilihat atau diceritakan kepadanya. Pengalaman tersebut menjadi dunia keseharian mereka sebagai aktivis Hizbut Tahrir.

Berikut gambar hasil penelitian tentang makna khilafah dan politik aktivis Hizbut Tahrir Pekanbaru.



Gambar 1
Model Konstruksi Makna Khilafah dan Politik Aktivis Hizbut Tahrir Pekanbaru
Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian (2016)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang konstruksi makna khilafah dan politik aktivis Hizbut Tahrir Pekanbaru, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Informan penelitian memaknai khilafah dan politik dengan makna yang beragam

tergantung dari pengalaman dan interpretasinya sebagai aktivis Hizbut Tahrir. Pertama, ada yang memaknai khilafah dengan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin. Kedua, memaknai khilafah dengan pemerintahan Islam bagi kaum muslimin sedunia. Ketiga, memaknai

khilafaah dengan sesuatu keharusan bagi orang muslim. Keempat, memaknai khilafah dengan hal yang penting, antara hidup dan mati dan menjadi solusi bagi umat Islam dan manusia.

Temuan penelitian selanjutnya, terdapat pula keragaman makna politik yang diungkapkan oleh informan penelitian. Pertama, memaknai politik dengan mengurus umat dan memelihara urusan-urusan masyarakat. Kedua, memaknai politik dengan mengurus umat dalam dan luar negeri. Ketiga, memaknai politik dengan membina masyarakat. Keempat memaknai politik dengan mengurus umat dengan aturan Allah. Kelima, memaknai politik dengan tidak masuk parlemen. Keenam, memaknai politik dengan amar ma'ruf nahi munkar dan tidak mesti ikut pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Bustanuddin. 2006. *Agama dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Berger, Peter L & Thomas Luckman. 1966. *The Social Construction of Reality A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Penguin Books Ltd.
- Blumer, Herbert. 1969. *Symbolic Interactionism Perspective and Method*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Craig, Robert T & Heidi L Muller. 2007. *Theorizing communication Reading Across Traditions*. California: sage Publications.
- Cresswell, Jhon, W., 1998, *Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Tradition*, California: Sage Publication
- _____. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design; Choosing Among Five Approach*. Second Edition. California: Sage Publications.
- Griffin, EM, 2009. *Communication Theory*, New York; Mc Graw Hill.
- Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos, 2012. *Dari Radikalisme menuju Terorisme*. Jakarta: Pustaka masyarakat.
- Kuswarno, Engkus, 2008. *Etnografi Komunikasi, suatu pengantar dan contoh penelitian*, Bandung: Widya Padjadjaran
- _____, 2009. *Fenomenologi, Konsep, Pedoman dan contoh Penelitian*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Littlejohn, Stephen W. 2006. *Theories of Human Communication*, California: Wadsworth Publishing.
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, modern, Posmodern dan Poskolonial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miles Matthew B, Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI press.
- Morissan dan Andy Corry Wardhany, 2009. *Teori Komunikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Mulyana, Deddy, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rumadi. 2002. *Masyarakat Post-Teologi, Wajah baru Agama dan Demokratisasi Indonesia*. Bekasi: Gugun Press.
- Sunarto, Kamanto. 1993. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : UI Press.
- Wictorowicz, Quintan, 2012. *Gerakan Sosial Islam, Teori, Pendekatan dan Studi Kasus (Terjemahan)*. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Disertasi:
- Ali Maksum, 2012. *Diskursus Islam dan Demokrasi di Indonesia: Studi Critical Discourse Analysis terhadap Pemikiran Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir Indonesia*. Disertasi, Universitas Airlangga.
- Mahmuddin, 2010. *Gerakan Islam Formalisasi Syariat (Studi tentang Gerakan Islam Hizbut Tahrir dan Gerakan Islam Lokal Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan*. Disertasi, UIN Sunan Kalijaga.
- Syamsul Arifin, 2004. *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalists: Studi tentang Hizbut Tahrir Indonesia*. Disertasi, IAIN Sunan Ampel.